

# Depolitisasi Ruang Publik untuk Perencanaan Pembangunan Daerah

**Prihadi Nugroho, ST, MT, MPP**

Jurusan Perencanaan wilayah dan Kota Universitas Diponegoro

## **Abstrak**

Fenomena alih fungsi lahan yang menyimpang dari rencana tata ruang masih terus berlangsung hingga saat ini. Struktur pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang asimetris merupakan faktor penyebab ketidakserasian antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya perangkat peraturan yang berlaku untuk menjaga komitmen dan konsistensi tindakan pemerintah daerah dalam mematuhi rencana tata ruang, berkembangnya pragmatisme pola kebijakan rezim pemerintah yang berkuasa, serta kurangnya kontrol dari komunitas perencana dan masyarakat. Segmentasi keterlibatan praktisi perencanaan dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan membuat aparat pemerintah daerah dapat leluasa mendikte orientasi strategi dan program pembangunan. Oleh karenanya, transparansi pengambilan kebijakan melalui advokasi perencanaan secara menyeluruh dan perluasan forum dengar pendapat (*public hearing*) mesti diakomodasikan secara legal formal untuk menjamin kemantapan (*stability*) dan keterjangkauan (*predictability*) perencanaan pembangunan daerah.

**Kata kunci** : alih fungsi lahan, struktur pengambilan kebijakan, advokasi perencanaan, *public hearing*